



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUTOPO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
3. NHK : 441429

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.586.740.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/150 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 678.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 172.400.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, LAINNYA Rp. 265.000.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 97.440.000
5. Tanah Seluas 2185 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
6. Tanah Seluas 437 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/71 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
8. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
9. Tanah Seluas 244 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 48.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **111.200.000**



1. MOTOR, SUZUKI HAYATE SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000
2. MOBIL, DAIHATSU LUXIO 1.5 X M/T (S402RG-ZMXFJJ JS) [SECOND] Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.775.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 186.610.937

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.930.325.937

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.930.325.937

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.